

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata pada setiap daerah di Indonesia masih menjadi masalah yang dilematis. Kondisi dilematis ini disebabkan beberapa potensi pariwisata yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan infrastruktur penunjang pariwisata. Hal ini diperkuat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, dalam kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdapat masalah yang dihadapi yaitu ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal, kemudahan investasi yang belum optimal.<sup>1</sup> Artinya, kuantitas potensi destinasi wisata saja tidak cukup untuk meningkatkan efek linearitas bagi pertumbuhan daerah.

Di Kota Tual sendiri terdapat banyak potensi pariwisata dari mulai tahun 2017 terdapat 5 objek wisata, pada tahun 2018 bertambah menjadi 7 objek wisata dan pada tahun 2019 sudah terdapat 10 objek wisata.<sup>2</sup> Namun, tidak semua kawasan pariwisata di Kota Tual mampu dioptimalkan. Hanya beberapa saja dari sekian banyak potensi pariwisata yang ada di Kota Tual khususnya wisata bahari yang mana merupakan 3 destinasi andalan yaitu Pantai Difur, Pulau Adranan, dan Pulau Bair. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Tual dihadapkan pada persoalan ketersediaan sarana dan prasarana

---

<sup>1</sup> Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja*. Kementerian Pariwisata. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018 Pukul 12.22 WIB.

<sup>2</sup> (<https://www.scribd.com/document/367646327/POTENSI-KOTA-TUAL-2017>) Diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 16.35 WIT.

pendukung. Padahal dalam kondisi lingkungan yang dinamis pemerintah dituntut untuk selalu adaptif dengan perubahan. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan yang fluktuatif dan dinamis menuntut peran pemerintah untuk mewadahi semua kepentingan masyarakat.

Berbagai kerjasama antar stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengembangan pariwisata juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik akan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Istilah kerjasama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik ataupun organisasi pemerintahan dalam proses pengambilan suatu keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program public, serta aset publik.<sup>3</sup>

Salah satu daerah yang menerapkan konsep *Collaborative Governance* dalam mengatasi pengembangan pariwisata adalah Kota Tual yaitu tentang satu *event* Kebudayaan Unggulan bagi Pemerintah Kota Tual. Kesuksesan yang dicapai dalam penyelenggaraan *Festival Meti Kei* tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat. Konsep yang dibangun dalam *event* ini adalah dengan desain sampuran antara budaya lokal dengan desain modernitas, sehingga

---

<sup>3</sup>Giat Tri Sambodo. 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI.Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik. Vol.3. No.1

dalam pelaksanaannya diperlukan peran sumber daya non-pemerintah dan *stakeholder* lainnya agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan.<sup>4</sup>

Demikian halnya dengan salah satu wisata yang terkenal di Kota Tual yaitu wisata Pulau Bair. Kota Tual yang letaknya terppencil di tenggara Maluku sedikit terdengar asing oleh beberapa orang, namun Kota Tual yang berada di kawasan perairan arafura ini menyimpan keelokan alam yang tiada duanya. Posisinya yang diapit pulau Seram, Papua, dan Kepulauan Aru, memberi ruang bagi Kota Tual untuk mengeksplorasi potensi menjadi kawasan bahari utama di Indonesia timur bersama wakatobi, bunaken, dan raja ampat.<sup>5</sup> Maka dari itu sudah selayaknya pengembangan wisata Pulau Bair yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga sesuai dengan potensi Kota Tual menjadi Kawasan Bahari Indonesia timur .

Melihat adanya potensi yang ada sangatlah tepat jika menggali dan mengembangkan potensi wisata menjadi sebuah aset yang memacu perkembangan pariwisata daerah. Hakekat pariwisata bertumpu pada keunikan, kekhasan dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah. Hakekat ini menjadi konsep dasar dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia, maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata harus mengutamakan keseimbangan.<sup>6</sup>

Akan tetapi pengembangan pariwisata Pulau Bair selama ini dihadapkan pada persoalan. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak terkait yaitu Staff Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Tual pada

---

<sup>4</sup> Harmawan, B.N. 2017. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Melalui Festival Mei Kei*. Jurnal E-Sospol. Vol.IV. 50-55

<sup>5</sup><http://www.tualkota.go.id/> Diakses pada tanggal 4 Januari 2020 Pukul 13.15 WIB.

<sup>6</sup> Ridwan, Mohammad. 2012. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Medan: PT.Softmedia. Hal.15

tanggal 10 Januari 2020, mengatakan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pengembangan Wisata Pulau Bair yaitu<sup>7</sup> :

Pertama, belum optimalnya pengembangan destinasi Wisata Pulau Bair. Hal ini terlihat dari minimnya promosi yang dilakukan oleh agen travel wisata dan Pemerintah Kota Tual. Karena tidak semua agen travel wisata membuka paket wisata ke Pulau Bair..

Kedua, belum optimalnya kesadaran masyarakat di destinasi Kawasan Wisata Pulau Bair. Dari observasi yang dilakukan peneliti, peneliti belum melihat adanya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan yang ada di kawasan wisata Pulau Bair, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam merawat destinasi yang ada seperti membuang sampah sembarangan di area Pulau Bair.

Pengembangan dalam sektor pariwisata merupakan salah satu hal yang sangat berpotensi dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pernyataan “ *tourism can be a potent development tool, generating economic growth, diversifying the economy contributing to poverty alleviation and also creating backward and forward linkages to other production and service sectors* ”.<sup>8</sup> Bisa dikatakan, pariwisata mampu menjadi suatu aspek dalam pembangunan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan bidang produksi dan penyediaan jasa. Selain keuntungan yang sifatnya ekonomis, pariwisata juga memberikan keuntungan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 10 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Kurniawan, Fandy dalam (Christie, dan Crompton, 2003). 2016. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 Hal 47-48

dalam aspek kebudayaan. Pengembangan pariwisata juga mampu merembet pada penambahan lapangan kerja bagi masyarakat karena adanya objek wisata di daerahnya yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini tentunya akan menjadi keuntungan yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata mampu pula meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan wahan pengenalan dan pendidikan terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Semangat pengembangan pariwisata ini telah di tuangkan dalam sebuah regulasi yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Peran pemerintah daerah dan juga masyarakat di kawasan wisata sangat penting dalam perkembangan pariwisata di Kota Tual. Peran pemerintah disini antara lain adalah tentang pengaturan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing objek wisata. Salah satunya adalah alokasi yang digunakan untuk pengembangan kawasan keraton baik sumberdaya manusia maupun fisik, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan wisata Pulau Bair setiap harinya selalu ada yang berkunjung untuk menikmati keindahan pulau bair yang ada baik orang dewasa maupun anak kecil antar sekolah dan hal ini tidak hanya wisatawan nusantara saja melainkan wisatawan mancanegara juga. Pihak Pemerintah daerah Kota Tual sendiri Melalui Dinas Pariwisata menyatakan bahwa wisatawan atau pengunjung objek wisata bahari Pulau Bair di Tahun 2019 meningkat dari jumlah di tahun 2018.<sup>9</sup> Informasi tersebut semaiKn menunjukkan bahwa objek wisata Pulau Bair memiliki potensi yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu sangat perlu potensi tersebut di

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara pada 13 Januari dengan Bapak Ali Jafar Tamher selaku sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual

kembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Sehingga pengembangan pariwisata Pulau Bair patut menjadi program yang harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Kegiatan berwisata seperti ini akan semakin ramai apabila memasuki saat libur panjang yaitu libur lebaran. Dibawah ini merupakan tabel jumlah pengunjung wisata Pulau Bair yang ada di Kota Tual.

**Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawandi Pulau Bair  
Tahun 2017, 2018 dan 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengunjung</b>	<b>Presentase</b>
2017	18.431	11%
2018	58.625	35%
2019 <sup>10</sup>	88.918	54%

Sumber: Disparbud Kota Tual, 2019

Berdasarkan pada table di atas, telah terjadi peningkatan dari sisi jumlah pengunjung maupun persentase yang diperoleh pemerintah. Pada tahun 2017 menunjukkan jumlah pengunjung 18.431 orang dan Persentase 11% Sedangkan pada tahun berikutnya, tahun 2018 jumlah penghujung mencapai 58.625 orang dan persentase yang diperoleh mencapai 35%. Pada Tahun 2019 sendiri menunjukkan jumlah pengunjung 88.918 dan persentase 54%. Hingga per bulan Februari 2019. Data tersebut dsemakin memperjelas bahwa terjadi kenaikan jumlah pengunjung dan persentase yang diperoleh.

<sup>10</sup> Data pada tahun 2019 hanya sampai pada data bulan Februari

Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh Pemerintah Daerah setempat, ini membuktikan bahwa akan lebih banyak lagi pengunjung yang datang apabila pemerintah lebih memperhatikan kondisi Kawasan Wisata Pulau Bair, memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan yang baik dan terus maju, serta banyaknya menampilkan kegiatan daya tarik yang rutin terkait minatnya dan kesadaran wisatawan nusantara untuk lebih mengenal wisata bahari Pulau Bair. Kawasan wisata Pulau Bair perlu dilestarikan dan dikembangkan yang tentu memerlukan biaya operasional dan biaya perawatan yang tidak sedikit.

Sehingga peilihan teori *Collaborative Governance* dalam mengkaji kerjasama antar aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Private Sektor menjadi suatu hal yang penting karena menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan kawasan wisata Pulau Bair di Kota Tual dengan cara meningkatkan kolaborasi yang baik antar aktor yang terlibat. Walaupun dalam proses selanjutnya tetap peran pemerintah yang menjadi dominan dalam membawa kemajuan pariwisata.

Dalam proses *Collaborative Governance* ini, setiap aktor yang terlibat dalam melakukan pengembangan Kawasan Wisata bahari Pulau Bair harus saling membangun kepercayaan dan memahami satu sama lain. Membuat komitmen dan memiliki misi yang selaras untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik dari kolaborasi yang dibangun dalam pengembangan wisata Pulau Bair. Kondisi-kondisi itulah yang melatarbelakangi penelitian dalam penelitian yang berjudul **“Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair di Kota Tual”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata pulau Bair di Kota Tual?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat terlaksananya kolaborasi kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata pulau bair di Kota Tual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata Pulau Bair di Kota Tual
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata Pulau Bair di Kota Tual

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada uraian rumusan masalah serta tujuan yang telah dipaparkan, maka diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa manfaat kepada beberapa pihak tertentu untuk dijadikan acuan perbaikan pada bagian-bagian yang menjadi titik tumpu permasalahannya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis maupun akademis, yakni sebagai berikut :



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis terdapat beberapa manfaat yaitu salah satunya di harapkan agar dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan maupun referensi kepada pembaca ataupun penelitian selanjutnya mengenai kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata Pulau Bair di Kota Tual, serta memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata dalam mata kuliah Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Tual dan jajaran Organisasi Perangkat Daerahnya serta *stakeholder* lain seperti masyarakat dan sektor swasta dalam konteks kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata Pulau Bair di Kota Tual.
- b. Dapat menginspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan konsep yang sama dalam melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, swasta dalam pengelolaan pantai di suatu daerah yang mana tidak hanya menuntut peran aktif pemerintah saja, namun juga aktor lain seperti partisipasi dari pihak travel dan masyarakat.

## 3. Manfaat Akademis

- a. Menambah refrensi ilmiah sehingga bermanfaat untuk pengembangan mengenai kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam aspek mengenai

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pantai baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

## E. Defenisi Konseptual

Definisi konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga obyek-obyek ditempatkan dalam golongan tertentu. Obyek-obyek dihadirkan dalam bentuk bentuk satu kata.<sup>11</sup> Dengan demikian perlu peneliti diefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah :

### 1. *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* bermula dari pergeseran paradigma *government* menjadi *governance*. Menurut Cheema, *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta<sup>12</sup>. Oleh karena itu dalam *collaborative governance*, kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh tiga aktor yang saling berelasi dan melakukan kerjasama yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada

---

<sup>11</sup> Djamarah, Saiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.30

<sup>12</sup> Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media. Hal 38

konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik<sup>13</sup>. Fokusnya adalah pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan sebuah program yang dijalankan secara kolektif antar beberapa *stakeholder*. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintahan ini tidak hanya satu individu yang membuat keputusan melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan

## 2. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata dapat ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup oleh masyarakat. Dengan mengembangkan bidang pariwisata tentunya diharapkan pula berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah atau daerah di mana pariwisata itu berada. Karena memang pada dasarnya aktor dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata yakni pemerintah, beserta aktor-aktor lain yang terlibat seperti masyarakat dan swasta. Menurut Yoeti<sup>14</sup>, keberhasilan pariwisata dapat ditentukan oleh 3 faktor penting yakni, pertama, tersedianya objek dan daya tarik wisata. Kedua, adanya fasilitas darana dan prasarana yang mendukung. Ketiga, adanya fasilitas sasaran kepariwisataan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

## F. Definisi Operasional

---

<sup>13</sup> Ansell, Chriss dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Govetnance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Administration Research and Theory. Hal 545.

<sup>14</sup> Yoeti, Oka A.. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Definisi operasional yaitu suatu konsep bersikan indikator-indikator yang mampu untuk menunjukkan konsep yang dimaksudkan sehingga nantinya memudahkan peneliti dalam mengoperasionalkan permasalahan-permasalahan. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair di Kota Tual :

A. Kolaborasi tata Kelola Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair di Kota Tual

1. Pemetaan Aktor yang Terlibat Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pulau Bair.
2. Peran Masing-Masing Aktor dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pulau Bair.
3. Kordinasi Awal yang Dilakukan dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pulau Bair.
4. Kepemimpinan Fasilitatif dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pulau Bair.
5. Desain Institusional dalam Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pulau Bair
6. Proses Kolaborasi dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair
  - a. Dialog Tatap Muka
  - b. Membangun Kepercayaan
  - c. Komitmen terhadap proses
  - d. Kesepahaman Bersama
  - e. Hasil Sementara

B. Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam pengembangan pariwisata pulau bair di Kota Tual.

1. Tidak adanya dukungan regulasi atau aspek legal dalam kolaborasi dengan pihak Agen Travel dan Masyarakat.
2. Tidak adanya kolaborasi dengan pihak hotel dan restoran.
3. Minimnya keterlibatan agen travel wisata

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. “Dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun verbal dari orang-orang dan berperilaku yang dapat di amati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh”<sup>15</sup>. Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. “maksudnya menjelaskan hasil penelitian dengan menjelaskan secara narasi dalam tulisan serta menkolaborasikan antara data hasil penelitian lapangan dengan menarik benang merah atas landasan teoritik serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait pengembangan pariwisata”<sup>16</sup>.

#### **2. Subyek Penelitian**

<sup>15</sup> Gunawan. Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>16</sup> Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian dapat pula disebut sebagai informan, yang dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dalam pengembangan kawasan wisata Pulau Bair. Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kepala atau Staf Dinas Pariwisata Kota Tual.
- b. Direktur atau Staf Agen Travel Wisata Losir.
- c. Direktur atau Staff Agen Travel Wisata Midun.
- d. Masyarakat Sekitar Pulau Bair.

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber informasi dan data yang valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari sumber yang terpercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah keilmiah dan memperoleh data yang didapatkan dari sumber yang relevan. Menurut Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder<sup>17</sup>. Maka dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer yaitu suatu informasi yang diperoleh dari sumber pertama yakni berasal dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian yang relevan, tepat dan akurat terkait Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan pariwisata Pulau Bair serta

---

<sup>17</sup>*Ibid* Sugiyono. 2008. hlm. 225

ditambahkan dengan catatan lapang peneliti selama penelitian. Dikatakan demikian, karena peneliti berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Wisata Pulau Bair.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan perda, profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi, buku, jurnal, koran-koran lokal, media online terpercaya, Undang-Undang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Keberadaan data menjadi suatu hal yang penting dalam penelitian, data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Maka dalam menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif diajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada sumber data kemudian data yang diperoleh dalam bentuk teks dan gambar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya :

a. Observasi

Kegiatan observasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis hal-hal yang terkait dengan penelitian. Teknik ini dilakukan oleh peneliti langsung dengan cara turun ke lapangan, melihat lokasi objek penelitian dan melakukan pengamatan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung yang mana peneliti turun langsung ke lapangan yaitu melihat kondisi langsung Pulau Bair serta mendatangi Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kota Tual.

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendetail dan kejelasan dari setiap fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil data dan informasi yang diperoleh dari observasi yaitu kondisi lingkungan dari Pulau Bair, lingkungan dinas terkait, kolaborasi yang terlibat antara dinas terkait dan pihak lain, program kerja yang akan dilakukan terkait pengembangan Pulau Bair. Peneliti juga mempelajari mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berkompeten guna mendapatkan informasi yang jelas. Dalam suatu penelitian yang prosesnya menggunakan alat bantu seperti misalnya alat perekam yang mana agar peneliti lebih akurat dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Metode dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur yang mana pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu fokus peneliti tentang Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair dengan menggunakan *interview guide* untuk lebih mempermudah peneliti mendapatkan informasi. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu Kepala atau Staff Dinas Pariwisata Kota Tual, Travel Agent Loris dan Midun Tour and Travel, Masyarakat sekitar Pulau Bair.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yaitu berupa dokumen-dokumen atau data terkait pengembangan kawasan wisata Pulau Bair di Kota Tual yang didapat selama proses penelitian, buku catatan



lapang peneliti, gambar atau foto saat turun lapang yang sekiranya mendukung penelitian. Dokumentasi ini nantinya lebih mengarah kepada dokumen RPJMD Kota Tual, laporan tentang jumlah pengunjung yang berkunjung ke Pulau Bair, dan peraturan perundang-undangan Kementerian Pariwisata terkait pengembangan kawasan wisata

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan tempat tujuan yang dijadikan sebagai sasaran oleh penulis yang sesuai dengan kebutuhan bahan kajian penulis. Secara umum lokasi penelitian ini ialah di wilayah Kota Tual. Adapun yang akan menjadi tempat penelitian ini ialah : Dinas Pariwisata Kota Tual yang terletak di Jl. Soekarno Hatta.

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Karena jenis penelitian ini deskriptif kualitatif maka peneliti menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman,<sup>18</sup> sebagai berikut ini:

### **a. Pengumpulan Data**

Pada proses pengumpulan data ini dilakukan saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung, selama itulah pengumpulan data-data yang

---

<sup>18</sup>Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP. Hal.20

dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung pada Dinas terkait, melakukan wawancara dengan informan, mengumpulkan dokumentasi dan membuat catatan di lapangan dari hasil wawancara berkaitan dengan Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Pariwisata Pulau Bair.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilah serta memfokuskan data yang sudah diperoleh oleh peneliti yaitu data hasil wawancara dengan narasumber yang terpercaya, peraturan perundang-undangan Kementerian Pariwisata, RPJMD Kota Tual. Pada proses ini, peneliti melakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara bersama narasumber, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorisasikan sesuai fokus yaitu tentang Kolaborasi pengembangan kawasan wisata Pulau Bair.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data yang sesuai dengan pokok bahasan terkait tentang Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dalam pengembangan Pariwisata Pulau Bair. Selain daripada itu dapat mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.

#### c. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>19</sup> Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah untuk di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait pengembangan pariwisata Pulau Bair.

#### d. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan data adalah tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif dalam model interaktif. Jadi pada tahap pengambilan kesimpulan data menjurus pada jawaban pada fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pengembangan pariwisata Pulau Bair yang mana melalui pendekatan *collaborative governnace*. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hal.341